**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT PAKAIAN DI PASAR
TRADISIONAL ABAI SIAT KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN
DHARMASRAYA**

Wilaga Saputra¹, Johan Agustian², Lesis Andre³, Susi Puspita Sari⁴

^{1,2,3,4} Hukum Ekonomi Syariah STITNU Sakinah Dharmasraya

Alamat e-mail: Saputrawilaga@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the widespread practice of clothing credit transactions among lower-middle-class communities at the Abai Siat Traditional Market. Credit systems are seen as a solution for meeting clothing needs amid economic limitations. However, from an Islamic legal perspective, such practices require further analysis, as they may involve elements of gharar (uncertainty), riba (usury), and violations of Sharia principles. The aim of this research is to understand how clothing credit is implemented and assess its compliance with Islamic law. The research uses a qualitative descriptive method with an empirical legal approach. Data collection was conducted through direct observation, interviews with five clothing vendors, five credit users (buyers), and three local religious figures, along with supporting documentation. This approach aims to explore the social reality of credit practices and evaluate their alignment with Islamic commercial law (muamalah). Findings indicate that three out of five vendors applied Sharia-compliant credit systems, with clear contracts (akad), maximum repayment periods of two to three installments, fixed prices for both cash and credit purchases, and mutual consent from both parties. Meanwhile, two vendors showed indications of non-compliance with Islamic principles, especially due to the absence of clear payment terms and lack of written agreements—conditions that fall under gharar. In conclusion, clothing credit practices that are clear, fair, and transparent, and follow the legal requirements of Islamic transactions, are permissible and beneficial. However, practices involving uncertainty need to be improved to ensure they do not violate Sharia principles or harm either party involved.

Keywords: Credit, Islamic Law, Traditional Market, Riba, Gharar.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena maraknya praktik kredit pakaian di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Pasar Tradisional Abai Siat. Sistem kredit dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan sandang di tengah keterbatasan ekonomi. Namun, dalam perspektif Hukum Islam, praktik ini perlu dianalisis karena berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit pakaian serta menilai kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, melalui observasi langsung, wawancara dengan lima pedagang, lima pembeli, dan tiga tokoh agama, serta dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan mengeksplorasi realitas sosial dari praktik kredit tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima pedagang melaksanakan sistem kredit sesuai syariah, dengan akad

yang jelas, jangka waktu pelunasan maksimal dua hingga tiga kali cicilan, harga yang tidak dibedakan antara tunai dan kredit, serta adanya kerelaan kedua belah pihak. Sementara dua pedagang lainnya tidak menetapkan jangka waktu pembayaran dan tidak membuat pencatatan akad yang jelas, sehingga mengandung unsur gharar. Kesimpulannya, praktik kredit pakaian dapat diterima dalam Islam jika dilakukan secara jelas, adil, dan transparan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Praktik yang masih mengandung ketidakjelasan perlu diperbaiki agar tidak bertentangan dengan syariah dan tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Kredit, Hukum Islam, Pasar Tradisional, Riba, Gharar.

A. Pendahuluan

Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Secara etimologis, hukum berarti keputusan atau ketetapan, sementara Islam berarti ketundukan dan kepatuhan. Dengan demikian, hukum Islam dimaknai sebagai peraturan Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur perilaku manusia agar selaras dengan kehendak-Nya. Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga keadilan, ketertiban, serta menciptakan ketenangan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat (Ali, 2016: 25). Keistimewaan hukum Islam terletak pada sifatnya yang universal, adil, dan abadi, sehingga tetap relevan sepanjang zaman (Rohidin, 2016: 47).

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, serta hukum yang bersifat

global dan universal (Shihab, 2013: 112). Hadist atau As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi. Melalui sunnah inilah rincian hukum dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2018: 89). Keduanya menjadi landasan utama dalam pengambilan hukum Islam, yang kemudian diperkuat oleh sumber hukum lain seperti ijma' dan qiyas (Daud Ali, 2002: 133).

Salah satu aspek penting dalam pembahasan hukum Islam adalah larangan riba. Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan dalam istilah syariat riba adalah tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan. Allah SWT dengan tegas melarang praktik riba karena dianggap merugikan, menimbulkan ketidakadilan, dan mengeksploitasi pihak yang lemah. Larangan ini tercantum dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 278–279, yang menggambarkan bahwa memakan riba bagaikan orang kesurupan dan perbuatan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (Quraish Shihab, 2000:

295). Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem ekonomi berbasis keadilan dan kemitraan, seperti bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah, yang lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong dan kesejahteraan bersama (Antonio, 2001: 74).

Jual Beli

Jual beli dalam Islam memiliki posisi penting sebagai bagian dari muamalah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran harta dengan harta, sementara menurut syariat diartikan sebagai akad pertukaran yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Al-Jaziri (2016: 262) menyebut jual beli sebagai proses pemindahan hak milik suatu barang dengan barang lain, sementara Sabiq menegaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar kerelaan bersama (*an taradin*). Dengan demikian, jual beli dalam Islam tidak hanya bermakna transaksi ekonomi, tetapi juga sarana untuk menciptakan tolong-menolong antar manusia (Puspisari, 2022: 87).

Islam menegaskan kebolehan jual beli selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, dan kezaliman. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Afipudin, 2019: 22). Ayat lain, QS. An-Nisa: 29, menekankan prinsip kerelaan dalam transaksi, sementara

QS. Hud: 85 menegur keras praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan. Para ulama sepakat bahwa jual beli adalah pekerjaan yang halal dan terhormat, bahkan pelakunya mendapat kedudukan mulia di akhirat jika dilakukan dengan jujur (Subairi, 2021: 65). Dengan demikian, jual beli dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang halal, bermanfaat, dan berlandaskan keadilan. Agar transaksi sah menurut hukum Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat tertentu. Rukun jual beli mencakup adanya pihak yang berakad (aqid), objek transaksi (ma'qud alaih), dan shighat ijab qabul. Pihak yang bertransaksi harus baligh, berakal, dan mampu bertindak hukum (Pase, 2023: 169). Objek jual beli harus halal, bermanfaat, berada dalam kepemilikan penjual, dapat diserahkan, dan jelas sifatnya (Subairi, 2021: 68). Adapun shighat ijab qabul harus sesuai, tanpa jeda panjang, dan tidak disertai syarat yang membatalkan (Subairi, 2021: 69). Dengan memenuhi rukun dan syarat ini, praktik jual beli tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga menjamin keadilan, transparansi, serta kepastian hukum, termasuk dalam praktik modern seperti sistem kredit (Jureid, 2022: 33).

Jual Beli Kredit

Jual beli kredit (ba'i taqsith) merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang biasanya lebih tinggi dibandingkan pembayaran tunai. Islam membolehkan praktik ini

selama tidak mengandung riba, gharar, dan ketidakadilan, serta dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Perbedaan mendasar antara jual beli kredit dan riba terletak pada dasar transaksinya; tambahan harga dalam kredit adalah kompensasi atas penundaan pembayaran, sementara riba adalah tambahan bunga tanpa adanya transaksi jual beli yang sah (Muhibbudin, 2017: 230; Wati, 2022: 51–52). Landasan hukum jual beli kredit juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta QS. Al-Baqarah: 282 yang memerintahkan pencatatan utang piutang. Hadis Rasulullah SAW yang membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara hutang dengan menggadaikan perisainya semakin menegaskan kebolehan transaksi kredit selama dilandasi transparansi dan keadilan (Huda, 2022: 22; Mubarroq, 2023: 100).

Meski mayoritas ulama memperbolehkan jual beli kredit, praktiknya tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sesuai syariah, seperti adanya kejelasan harga, penentuan jangka waktu pembayaran, kesepakatan akad, dan dokumentasi transaksi. Penjual dilarang menambahkan denda atau menaikkan harga karena keterlambatan pembayaran, karena hal itu termasuk riba nasi'ah yang diharamkan. Selain itu, transaksi kredit tidak boleh mengandung unsur

penipuan (tadlis) maupun spekulasi (tawaruq), melainkan harus berorientasi pada kebutuhan yang nyata dan bermanfaat. Praktik ini memiliki keuntungan seperti memberikan akses bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial, meningkatkan volume penjualan, serta membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, risiko yang muncul antara lain ketidakjelasan akad, potensi menunggak, dan harga yang lebih tinggi dibanding pembayaran tunai (Sari, 2020: 35; Ahmad, 2021: 42; Hasanah, 2023: 60; Mardani, 2022: 50; Zaini, 2021: 77; Alwi, 2022: 29; Rudi, 2022: 579). Dengan memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kejujuran, jual beli kredit dapat menjadi solusi ekonomi yang sah dalam perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris untuk mengungkap praktik kredit pakaian di Pasar Tradisional Abai Siat dalam perspektif Hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menilai bagaimana hukum tersebut dipahami dan dipraktikkan masyarakat melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi aktivitas jual beli. Dengan demikian, penelitian ini mampu menggambarkan secara faktual prosedur transaksi, perilaku pedagang, dan persepsi konsumen terhadap sistem kredit pakaian yang diterapkan. Sebagaimana ditegaskan

oleh Puspita Sari (2021: 88) yang mengutip Sugiyono (2012: 15), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena nyata di masyarakat secara mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik kredit pakaian serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Kredit Pakaian di Pasar Tradisional Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

Penelitian mengenai praktik kredit pakaian di Pasar Tradisional Abai Siat menunjukkan bahwa sistem kredit menjadi pilihan utama masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan remaja, karena keterbatasan ekonomi dan kebutuhan mendesak. Skema pembayaran angsuran dianggap lebih fleksibel dibandingkan pembayaran tunai, sehingga membantu konsumen untuk memperoleh pakaian tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Faktor utama yang melatarbelakangi pembelian secara kredit adalah keterbatasan dana, prioritas kebutuhan rumah tangga, serta keinginan remaja untuk memenuhi kebutuhan penampilan

meski belum memiliki penghasilan tetap.

Dari sisi penjual, pemberian fasilitas kredit dilandasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan daya tarik jualan, mempercepat perputaran barang, dan sebagai bentuk kepedulian sosial. Namun, mekanisme kredit bervariasi: ada pedagang yang memberikan kelonggaran penuh tanpa batas waktu pembayaran, ada yang menetapkan cicilan mingguan dengan harga berbeda, serta ada pula yang hanya memberikan kredit kepada kerabat atau pelanggan lama yang sudah dipercaya. Beberapa penjual bahkan tetap berpegang teguh pada prinsip tunai karena pengalaman buruk dengan kredit macet.

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun sistem kredit memudahkan konsumen, tidak adanya batas waktu pelunasan yang jelas menimbulkan risiko bagi pedagang, seperti keterlambatan pembayaran hingga macet. Hal ini berdampak pada stabilitas modal usaha pedagang kecil. Dengan demikian, praktik jual beli kredit di Pasar Abai Siat dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi sosial-ekonomi yang saling menguntungkan, namun tetap

memerlukan kejelasan akad dan aturan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Tabel 1 Data Hasil Penelitian

No	Informan	Status	Alasan	Mekanisme
1	Rosmiati	Pembeli	Keterbatasan dana, kebutuhan lain lebih prioritas	Kredit cicilan ringan, fleksibel tanpa tekanan waktu
2	Rahmayanti	Pembeli	Dana terbatas, tidak bisa beli tunai	Kredit jadi solusi untuk tetap punya barang
3	Indah Lenggogeni	Remaja	Belum punya penghasilan tetap, kredit fleksibel	Harga kredit lebih mahal, tapi bisa bayar kapan saja
4	Ibu Neli	Pembeli	Terasa ringan karena bisa bayar kapan saja	Menolak jika ditentukan waktu pelunasan tegas
5	Ibu Titin Anggraini	Pembeli	Fleksibilitas pembayaran sesuai kemampuan	Tidak masalah harga kredit lebih mahal
6	Lisa Umami	Penjual	Agar dagangan laku, pembeli merasa ringan	Harga tunai Rp150.000 → kredit bisa Rp200–300 ribu, cicilan mingguan Rp20 ribu, tanpa batas waktu pelunasan

7	Asnita Diroza	Penjual	Membantu masyarakat, percepat barang laku	Harga kredit Rp200 ribu (2–3 kali bayar), tanpa batas waktu
8	Beti Suryani	Penjual	Hanya beri kredit ke kerabat/pelanggan lama	Harga sama tunai & kredit, cicilan singkat 2–3 kali
9	Zuhelmi	Penjual	Awalnya tunai, lalu kredit terbatas	Harga kredit = tunai, tanpa bunga, hanya ke pembeli terpercaya
10	Amir	Penjual	Trauma kredit macet Rp20 juta	Sekarang hanya tunai, kadang beri kelonggaran seminggu, harga tetap
11	Zuhelmi (lainnya)	Penjual	Prinsip tunai, menolak kredit	Kadang toleransi seminggu jika pembeli lupa bawa uang

Analisis terhadap praktik kredit pakaian di Pasar Tradisional Abai Siat menunjukkan bahwa konsumen umumnya memilih membeli secara kredit karena keterbatasan dana, kebutuhan mendesak, serta fleksibilitas pembayaran yang dianggap meringankan, meskipun harga kredit lebih tinggi dibandingkan

pembayaran tunai. Bagi ibu rumah tangga, kredit menjadi solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok, sementara bagi remaja, kredit dipilih karena belum memiliki penghasilan tetap. Dari sisi pedagang, pemberian kredit dilakukan dengan tujuan agar barang cepat laku, membantu masyarakat, sekaligus mempertahankan pelanggan, meskipun mekanismenya beragam, mulai dari cicilan mingguan, pembayaran bertahap tanpa batas waktu, hingga pemberian kredit hanya kepada kerabat atau pelanggan yang sudah dipercaya. Namun, terdapat pula pedagang yang menolak praktik kredit karena pengalaman buruk kredit macet yang merugikan modal usaha, sehingga mereka lebih memilih sistem tunai dengan toleransi terbatas. Temuan ini menggambarkan bahwa praktik kredit pakaian merupakan strategi adaptif antara kebutuhan konsumen dan kepentingan pedagang, namun rentan menimbulkan risiko jika tidak disertai dengan kesepakatan yang jelas.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Pakaian di Pasar Tradisional Abai Siat Kecamatan

Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik kredit pakaian di Pasar Tradisional Abai Siat berjalan dengan mekanisme yang beragam, mulai dari sistem cicilan fleksibel tanpa batas waktu hingga kredit jangka pendek yang dibatasi dua sampai tiga kali cicilan. Dari sisi **keabsahan akad**, mayoritas transaksi dilakukan secara lisan tanpa pencatatan atau saksi, sehingga belum sepenuhnya memenuhi syarat transparansi sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah: 282. Hal ini menimbulkan potensi **gharar (ketidakjelasan)** terutama pada aspek waktu pelunasan dan sistem pembayaran. Dari segi **penetapan harga**, sebagian pedagang menetapkan harga lebih tinggi untuk kredit (misalnya Rp150.000 tunai menjadi Rp200.000–Rp300.000 kredit), sedangkan sebagian lainnya menetapkan harga tetap tanpa tambahan. Kenaikan harga diperbolehkan dalam Islam jika telah disepakati di awal, namun praktik kenaikan harga tanpa kejelasan akad berpotensi mendekati riba.

Analisis terhadap unsur **gharar** menunjukkan bahwa sebagian besar

pedagang tidak mengalami masalah pada kejelasan objek transaksi maupun kepemilikan barang, tetapi 40% pedagang (2 dari 5) masih menjalankan sistem kredit tanpa batas waktu pelunasan yang jelas, sehingga menimbulkan risiko ketidakpastian. Kasus kerugian besar hingga Rp20 juta yang dialami salah satu pedagang (Amir) memperkuat bukti adanya risiko tinggi dalam praktik ini.

Selain itu, hasil wawancara dengan para tokoh agama (Tuangku Mudo Batuah, Tuangku Malin Pandito, dan Tuangku Kuning) menunjukkan pandangan seragam bahwa praktik kredit pakaian di pasar ini masih bermasalah dari perspektif syariah, terutama karena ketidakjelasan akad, penggabungan dua akad dalam satu transaksi (tunai dan kredit sekaligus), serta adanya unsur riba akibat penambahan harga yang tidak sah. Para tokoh agama menekankan perlunya pemisahan akad tunai dan kredit, pencatatan transaksi, serta transparansi harga agar praktik muamalah ini sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 1. Sistem Kredit Pembeli (n=5)

Mekanisme Kredit	Jumlah Pembeli	Persentase

Cicilan ringan, tanpa batas waktu	3 orang	60%
Kredit fleksibel, tergantung kemampuan	1 orang	20%
Menolak batas waktu tegas	1 orang	20%

Tabel 3 Mekanisme Pedagang (n=6)

Mekanisme	Jumlah Pedagang	Persentase
Harga kredit lebih tinggi (Rp200–300 ribu)	2 orang	33,3%
Harga kredit = tunai, cicilan singkat	2 orang	33,3%
Hanya tunai, toleransi 1 minggu	1 orang	16,7%
Menolak kredit sepenuhnya	1 orang	16,7%

Tabel 4 Indikator Gharar (n=5 pedagang)

Indikator	Jumlah Pedagang Bermasalah	Persentase
Ketidakjelasan akad	0	0%
Objek transaksi tidak jelas	0	0%

Risiko berlebihan (tanpa batas waktu)	2	40%
Penipuan/manipulasi	0	0%
Ketidakpastian kepemilikan	0	0%

Praktik kredit pakaian di Pasar Abai Siat masih mengandung kelemahan dari sisi syariah, khususnya dalam hal akad yang tidak jelas, ketidakpastian waktu pelunasan (40%), serta perbedaan harga kredit yang berpotensi mendekati riba (33,3%). Untuk memperbaikinya, perlu ada pencatatan transaksi, pemisahan akad tunai dan kredit, serta edukasi muamalah syariah bagi pedagang dan pembeli.

E. Kesimpulan

Penelitian tentang praktik kredit pakaian di Pasar Tradisional Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa sistem kredit menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan sandang bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, dengan mekanisme yang beragam dan umumnya hanya

berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian formal maupun batas waktu pelunasan yang jelas. Dari lima pedagang yang diwawancarai, sebagian menerapkan tambahan harga pada kredit jangka panjang, sebagian memberi kelonggaran pembayaran hanya untuk pelanggan tetap tanpa tambahan harga, sementara lainnya menolak sistem kredit karena dinilai berisiko. Ditinjau dari hukum Islam, praktik ini masih belum sepenuhnya sesuai syariah karena adanya ketidakjelasan akad, waktu pelunasan, dan perbedaan harga yang berpotensi mengandung unsur gharar serta mendekati riba nasi'ah, sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Baqarah: 282. Meski demikian, terdapat pula pedagang yang menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah, seperti pola qardhul hasan yang menekankan tolong-menolong tanpa keuntungan tambahan. Secara keseluruhan, praktik kredit pakaian di pasar ini bersifat heterogen dan memerlukan edukasi serta literasi ekonomi syariah agar akad lebih jelas, transaksi lebih adil, serta sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim (Surah Al-Baqarah ayat 188, 275 dan 282; Ali 'Imran ayat 20; An-Nisa ayat 29; Hud ayat 1 dan 85; Ibrahim ayat 1; Al-Hijr ayat 9; An-Nahl ayat 44; Ar-Rum ayat 39; Al-Hasyr ayat 7).
- Hadist Rasulullah SAW (HR Muslim No 1017; Muslim no. 1513; Abu Dawud No 3355).
- Ahmad, Z. (2021). *Sistem Kredit dalam Perspektif Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Jaziri, A. (2016). *Fikih Empat Madzhab 3*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Alwi, T. (2022). *Transaksi Ekonomi dalam Islam*. Malang: UMM Press.
- As-Sa'di, A. bin N. (1992). *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuun Al-Akhbaar fi Syarhi Jawaami' Al-Akhbaar* (Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II). Beirut: Dar Al-Jail.
- Budiastuti, D. & Bandur, A. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas Aliditas*. Jawa Barat: Mitra Wacana Media.
- Hasanah, R. (2023). *Jual Beli Kredit: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani, M. (2022). *Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Buku Lintang Rasi Aksara.
- Rohman, M. (2020). *Fiqh Muamalah: Konsep dan Implementasi dalam Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Sari, M. (2020). *Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih muamalah: Teori dan implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Subairi, (2021). *Fiqh Muamalah*. Pamekasan Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, A. (2021). *Pasar Tradisional dan Pembangunan Ekonomi Lokal*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, B. (2021). *Praktik Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaini, A. (2021). *Pengelolaan Risiko dalam Jual Beli Kredit*. Surabaya: UINSA Press.

- Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2023). *"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus kredit Barang Rumahan untuk warga kurang Mampu, studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten kampar"*. Oleh: El Synta Putri.
- Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022). *"Konsep Jual Beli Kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi"*. Oleh: Wati.
- Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram (2021). *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur"*. Oleh: Arwina Aulia Utami Fariz.
- Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019). *"Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah terhadap praktik jual beli Herbal dan Rempah di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo"*. Oleh: Muhammad Afipudin.
- Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (2025). 3(1), 545. *Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam*. Oleh: Nabila Lutfianisa, Hana Naf'atun Sholihah dan Muhibban.
- Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum (2024). 2(6), 144. *Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya*. Oleh: Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani dan Wismanto.
- JHESY (Jurnal hukum Ekonomi Syariah) (2023). 2(1), 9. *Analisis hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli makanan tanpa harga (studi kasus rumah makan sugema raya karangpawitan garut)*. Oleh: Syaik Abdillah.
- As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal (2023). 2 (2), 169. *Urgensi Ekonomi Islam terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*. Oleh: Fahreza Akbar Pase dan Yenni Samri Juliati Nst.
- Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat (2023). 3(1), 101 *Sosialisasi dan pengenalan perbankan syariah di smk Islam miftahul huda megamendung*. Oleh: Firda Novianti dan Andri Brawijaya.
- Jurnal Iman Dan Spiritualitas (2023). 3(4), 621. *Eksistensi corak tafsir hukmi dalam penafsiran al-quran*. Oleh: Acep Ihsan Rohmatullah dan Faishal Al-Ghifari.
- Tadayun (2023). 4 (1), 100. *Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer*. Oleh: Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah.
- Jurnal Iqtisaduna (2023). 9(2), 145-146. *Distribusi pendapatan*

- dan kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam: Tantangan dan prospek masa depan. Oleh: Angga Syahputra, Isnaini Harahap, Zuhri M. Nawawi dan Kaswinata Kaswinata.
- Jurnal Hukum Samudra Keadilan (2023). 16(2), 301. *Kepastian hukum restrukturisasi kredit perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah pada masa covid-19 di pt. bank sumut kantor cabang pembantu tanjung morawa.* Oleh: Talita Fildzah Nadilah.
- Tamaddun Journal of Islamic Studies (2022). 1(1), 3. *Memahami riba: definisi, tujuan dan penyebab.* Oleh: Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto.
- Jurnal Riset Perbankan Syariah (2022). 1(1), 63-68. *Tinjauan Fikiah Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Babakan Asem kabupaten sumedang.* Oleh: Lina Nurfitfiani.
- Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) (2022). 1 (2), 117. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas.* Oleh: Zakaria.
- Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA) (2022). 1 (4), 579. *Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu).* Oleh: Rudi dan Irvan Iswandi.
- Ar-Rihlah Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah (2022). 2(1), 76. *Pengaruh problematika riba terhadap kehidupan sosial dan perekonomian Masyarakat.*Oleh: Caroline Chiko Meyrisma Yanti dan Muhammad Yazid.
- Jurnal Sosial Teknologi (2022). 2(8), 668. *Eksistensi dan penerapan Hukum Islam dalam hukum positif indonesia.* Oleh: Umar Shofi dan Rina Septiani.
- Jurnal Ekonomi Syariah (2022). 3(1), 33. *Analisis praktik jual beli karet di desa kayu laut kecamatan panyabungan selatan dalam perspektif ekonomi Islam.* Oleh: Jureid.
- Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (2022). 4(2), 61. *Studi komparatif tentang hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional: sebuah perbandingan metodologi dan praktik.* Oleh: Ahmad Abdul Gani dan Budi Budiman.
- Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam (2022). 7(1), 52-53. *Etika bisnis ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa depan.* Oleh: Dena Ayu dan Syahrul Anwar.
- J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam (2022). 7 (2), 87. *Tinjauan hukum jual beli kredit*

- menurut agama Islam di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan. Oleh: Feni Puspisari, Ayu Iestari, Tiara Suci Khairunnisa, Kartika Dewi Sumardi, Randy Putra Pratama, M. Raffa Rifaldi dan M Agus Syahputra Mandala.
- El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman (2022). 7(2), 183. *Akad kartu kredit syariah: analisis perspektif hukum ekonomi Islam*. Oleh: Husni Shabri dan Muhammad Cholil Nafis.
- El-Faqih: Jurnal pemikiran dan Hukum Islam (2022). 8 (1), 22. *Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim*. Oleh: Miftakhul Huda.
- El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah (2021). 2(1), 25. *Hadist tentang jual beli dan riba: implementasi pada sistem kredit*. Oleh: Mhd Rasidin, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani dan Doli Witro.
- Akm Aksi Kepada Masyarakat (2021). 2(1), 80. *Sosialisasi pengenalan riba di desa betung II kecamatan lubuk keliat kabupaten ogan ilir sumatera selatan*. Oleh: Choirunnisak.
- Tawazun: Journal of Sharia Economic Law (2021). 4(1), 72. *Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal*. Oleh: Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf.
- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2021). 5(02), 130. *Analisis Hukum Islam terhadap cashback di tokopedia*. Oleh: Nurfyana Narmia Sari, Misbahuddin, Asfira Yuniar dan Ibtisam.
- MENARA Ilmu (2021). 15(2), 95. *Sikap keberagamaan masyarakat di Nagari Abai Siat kecamatan Koto Besar kabupaten Dharmasraya*. Oleh: Nidya Fitri, Rafqi Amin, Susi Puspita Sari, Widia Siska, Angel Sophia Intan, Alfadila Hasan, Afni Sagita dan Wilaga Saputra.
- TAHQIQA: Journal of Islamic Economics and Finance (2020). 14(1), 41-50. *Riba dalam perspektif Islam*. Oleh: Bukhari.
- Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum (2019). 5(1), 45. *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad*. Oleh: Aksamawanti.
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2018). 4(01), 138. *Sistem ekonomi (Islam) dan pelarangan riba dalam perspektif historis*. Oleh: Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita dan Tika Widiastuti.
- Jurnal Pemikiran Hukum Islam (2017). 13(2), 228. *Kredit: suatu kajian perspektif Hukum Islam*. Oleh: Muhibbuddin.
- Jurnal Akuntansi Dan Investasi (2017). 18(2), 145. *Mengungkap kesadaran Islami*

*atas riba pada proses
pembelajaran akuntansi.* Oleh:
Virginia Nur Rahmanti.

Islamic Economics Journal (2016).
4(2), 30. *Islamic Banking and
Finance: The Way Forward.*
Oleh: Muhammad Sabir.

ICR Journal (2012). 3(4), 618. *Ethics
and Finance: Perspectives of the
Shari'ah and Its Higher
Objectives (Maqasid).* Oleh:
Mohammad Hashim Kamali